

BAB III

PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID TENTANG PLURALISME AGAMA DI INDONESIA

A. Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid

Salah satu kesibukan para intelektual Muslim di seluruh dunia saat ini ialah memikirkan bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam perangkat nyata kehidupan modern. Seorang Muslim yang serius tentu menyadari, betapa ia dihadapkan pada tantangan hidup dalam suatu masyarakat modern, yaitu suatu masyarakat yang notabene merupakan kelanjutan logis, meskipun melalui proses transmudasi yang amat besar, dari berbagai unsur tatanan dan nilai hidup yang telah pernah berkembang sebelumnya, khusus di dunia Islam. Ilmu pengetahuan modern, misalnya, dengan mudah dapat ditelusuri asal-usulnya sebagai kelanjutan dunia keilmuan Islam yang pernah berkembang dalam masanya jayanya yang liberal, ketika kaum Muslim terlatih menghargai suatu temuan pikiran dan keilmuan baru, dan ketika wawasan mereka terbentuk karena semangat kosmopolitanisme dan universalisme sejati.¹ Namun pada saat yang sama,

¹ <http://leztariequ.blogspot.com/2009/06/pemikiran-modren-dalam-islam-menurut.html>...diakses pada tanggal 1 Maret 2012

karena tuntutan imannya, seorang Muslim modern harus tetap beradadalam pangkuan agamanya dan dijiwai nilai-nilai asasinya.

Membicarakan pemikiran politik Gus Dur, tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa Ia berada pada posisi *beyond the symbols*². Berbagai macam simbol atau peran melekat pada dirinya. Hal ini disebabkan oleh pemahaman Gus Dur sendiri terhadap realitas sosial yang multi dimensi, sehingga tanggapan atas realitas tersebut tidak bisa bersifat monolitik. Secara psikologis, Gus Dur besar diantara “tiga dunia”; yakni pertama, dunia pesantren yang penuh dengan ortodoksi, berstruktur hirarkis, feodal dan serba mengedepankan etika formal. Kedua, dunia Timur Tengah yang terbuka dan keras, dan ketiga, budaya Barat yang liberal, rasional dan sekular³.

Dari kompleksitas kepribadian inilah, terbentuk perspektif pemikiran dan perhatian yang multi dimensi. Mulai dari revivalisme pesantren, kritik pragmatisme pembangunan, pembaruan pemikiran agama, pribumisasi Islam, penjagaan budaya, sistem politik demokratis, dsb. Disisi lain berbagai peran yang bisa saling berlawanan satu sama lain yakni kyai, ketua ormas tradisional, pemikir liberal-humanis, politisi, aktivis LSM, budayawan, dan Presiden RI, membuat Gus Dur tak bisa lepas dari kontradiksi. Sebagai contoh, ketika menjabat sebagai presiden yang

² Meminjam judul buku *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, Tim INCRoS, Bandung : INCRoS, 2000.

³ Al-Zastrouw Ng. Gus Dur, Siapa sih Sampeyan?. Penerbit Erlangga : Jakarta. 1999. Hal.32

berasal dari kalangan muslim justru mengusulkan diperbolehkannya lagi ajaran komunisme berkembang, padahal sebagai presiden apalagi muslim, ia seharusnya tetap mengubur ideologi “sesat” yang dikutuk kaum muslim dan bersifat traumatik dalam rekaman sejarah orang Indonesia, semuanya terjadi karena Gus Dur selain berperan sebagai presiden-kyai, juga seorang pemikir humanis.

Dari tiga dunia yang berbeda inilah Gus Dur mampu berpikir secara berbeda pula, karena perbedaan inilah Gus Dur mampu memandang bagaimana kondisi sosial yang ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui kultur dan berkembang secara kultur, Indonesia bukan Timur Tengah yang condong pada hukum Islam, Indonesia juga bukan Eropa yang mampu bersikap liberal dalam segala hal. Indonesia adalah Indonesia yang sejak awal lahir atas dasar pluralitas, yang membuat dihapuskannya Piagam Jakarta oleh para penggagas kemerdekaan.

“Ketika kita berbicara tentang Indonesia kita harus berbicara Islam karena mayoritas penduduknya muslim, ketika kita berbicara Islam di Indonesia yang kita bicarakan harus Islam yang ada di Indonesia bukan Islam diluar Indonesia”⁴

Untuk lebih memudahkan memahami model pemikirannya, sebenarnya Gus Dur telah membuat semacam tipologi tentang pendekatan

⁴ Hasil wawancara dengan Alissa Wahid

yang digunakan umat Islam dalam usaha menampilkan citra Islam dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, ada tiga varian dalam hal ini:⁵

Pertama, pendekatan sosial-politik. Ini menekankan perlunya keikutsertaan dalam sistem kekuasaan yang ada. Tendensinya adalah menampilkan watak ideologis Islam serta menonjolkan sifat eksklusifistik Islam terhadap agama, paham ideologis lain. Kepentingan Islam adalah koridornya dan solidaritas Islam adalah tali pengikat. Sikap sekretarian sangat mudah berkembang dalam pendekatan seperti ini.

Kedua, pendekatan kultural. Pendekatan yang semata-mata kultural ini berkehendak untuk mewujudkan Islam dalam kesadaran hidup sehari-hari tanpa keterikatan dengan kelembagaan apapun kecuali dalam konteks penyebaran Islam secara budaya itu sendiri. Meskipun lebih menekankan wawasan universal Islam sebagai sebuah peradaban dunia, namun sering terjadi mutasi watak pendekatan ini ke dalam kehidupan ketika sejumlah proponennya berubah menjadi penuduh pihak lain mengganggu sistem kekuasaan. Coraknya yang semula inklusif bisa berubah menjadi pandangan historis yang menuding kelompok lain sebagai penyebab ketertinggalan umat Islam.

⁵<http://www.politikindonesia.com/readhead.php?id=84&jenis=itk...> di akses pada tanggal 28 Februari 2012

Ketiga, pendekatan sosio-kultural. Ini menekankan pada sikap mengembangkan pandangan dan perangkat kultural yang dilengkapi oleh upaya membangun sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang ingin dicapai. Pendekatan ini lebih mementingkan aktifitas budaya dalam konteks pengembangan lembaga-lembaga yang dapat mendorong transformasi sistem sosial secara evolutif dan gradual. Di sini tidak dipentingkan sikap untuk masuk ke dalam sistem kekuasaan atau tidak. Dalam pendekatan ini, dapat dengan mudah dimasukkan 'agenda Islam' ke dalam 'agenda nasional' bangsa secara inklusifistik.

Model ketiga inilah yang sebetulnya dipilih oleh Gus Dur yang mana menginginkan Islam menjadi kekuatan komplementer bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan.⁶ Ia secara konsisten menolak Islam dijadikan ideologi dan sistem politik alternatif, apalagi sebagai faktor tandingan yang bersifat disintegratif terhadap kehidupan bangsa. Sampai disini sudah dapat ditangkap sentrum pemikiran politiknya, yaitu bahwa Islam mengutamakan politik sebagai moralitas dan bukan politik sebagai institusi.

Dasar pemikiran itu jelas hendak mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan kesejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara atau di luarnya. Gus Dur sebagai seorang substansialitas adalah pemikiran dan

⁶ Ibid..

pendangannya yang berlandaskan pada perspektif historis, dengan pengertian bahwa eksistensi dan artikulasi nilai-nilai Islam yang intrinstik dalam iklim politik Indonesia lebih penting dan sangat memadai untuk mengembangkan Islamisasi Gus Dur menyebutnya dengan pribumisasi Islam, dalam wajah kulturalisasi masyarakat Indonesia modern⁷.

Dari proses kulturalisasi melahirkan kompetisi diantara berbagai kekuatan kultural, dan Islam hanyalah satu diantara kekuatan kultural yang bersaing itu. Hanya saja perlu diperhatikan, agar Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses Islamisasi haruslah mengambil bentuk kulturalisasi dan bukan politisasi. Karena itulah, gerakan-gerakan Islam sebaiknya menjadi gerakan budaya (*cultural movement*) dari pada menjadikan diri sebagai gerakan politik.

Dalam rantai tulisan Gus Dur yang berjudul "*Islam: Ideologis ataukah Kultural*" menjelaskan pemahaman Gus Dur tentang perkembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut Gus Dur memberikan contoh yang nyata bahwa Islam di Indonesia dari awal memang berkembang secara kultural. Upaya-upaya untuk memasukkan ideologi Islam kedalam kehidupan bernegara merupakan upaya egois untuk melegalkan Islam sebagai landasan kehidupan bernegara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia juga berlawanan dengan UUD 1945.

⁷ Ibid..

Karena sampai saat ini masih banyak orang yang menginginkan agar Piagam Jakarta di masukkan dalam pasal 29 UUD 1945, dan juga terkait dengan TAP MPR No.25 Tahun 1966 yang melarang ajaran Komunisme berkembang di Indonesia⁸.

Dinamisasi dari pemikiran Gus Dur ini berkembang lama sejak awal tahun 1970an, dan selama perkembangan pemikiran Gus Dur menerima banyak pujian sekaligus kritikan tajam baik didalam tubuh NU ataupun diluarnya. Seperti riset yang dilakukan oleh H.Fuad Anwar yang kemudian dibukukan dalam *Melawan Gus Dur* (2004). Riset tentang gaya komunikasi dan kepemimpinan Gus Dur ini diawali dengan pembahasan demokratisasi dalam tubuh "Republik Gus Dur" yang menuai fenomena "perlawanan" terhadap Gus Dur⁹. Dalam buku ini mengungkapkan ketidaksetujuannya beberapa petinggi ataupun kiyai dari NU terhadap pencalonan Gus Dur sebagai Presiden, juga mengkritisi gaya politik Gus Dur dan gaya komunikasi dari Gus Dur yang dianggap terlalu provokatif.

Pemikiran politik Gus Dur juga berangkat dari paradigma pembaruan sosial. Paradigma ini mengacu pada kebutuhan untuk melakukan modernisasi, bukan dari ruang luar kesadaran masyarakat, tetapi berangkat dari potensi internal rakyat. Satu hal yang kemudian menjadi

⁸ Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. The Wahid Institute : Jakarta. 2006. Hal. 42-59

⁹ Diambil dari <http://www.slideshare.net/moviedz/bab-01-pemikiran-politik-gus-dur>, yang diakses pada 8 Maret 2012

kritik atas pendekatan pembangunanisme yang memaksakan modernisasi sembari abai terhadap tradisi masyarakat.

Dalam pergulatan modernitas dan tradisi, persoalan yang sering muncul adalah problem akulturasi. Disini, proses "pembumian" nilai-nilai modernitas yang hegemonik, haruslah menciptakan identifikasi terhadap wilayah, serta siapa agen perubahan yang harus dirangkul guna menggerakkan berbagai proyek kemajuan. Disisi lain, dari pihak masyarakat Dunia Ketiga sendiri haruslah melakukan identifikasi diri, terhadap segenap kekuatan serta kelemahan: apakah tradisi bisa beradaptasi, atau bahkan melakukan perlawanan dengan modernitas¹⁰.

Banyak kalangan yang menyamakan pemikiran Gus Dur dengan Nurkholis Madjid, kedua tokoh ini dapat dianggap sebagai tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Baik Gus Dur maupun Nurkholis Madjid dikenal sebagai tokoh neo-modernism Indonesia. Gus Dur dan Cak Nur (sapaan Nurkholis Madjid), sama-sama menganggap bahwa Islam seyogianya tidak dijadikan sebagai ideologi-politik, sebab selain dikhawatirkan akan mereduksi nilai Islam, juga bisa mempersempit ruang gerak Islam dalam dinamika sosial-kemasyarakatan. Jika Islam tampil sebagai kekuatan ideologi-politik, maka itu bukan saja akan menjadikan umat Islam sebagai kelompok eksklusif dalam konfigurasi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, tetapi

¹⁰ Ibid,

juga bisa menciptakan situasi yang rentan terhadap munculnya konflik sosial politik, yang dilandasi oleh sentimen primordial dan emosi keagamaan. Konflik tersebut jelas dikhawatirkan bisa membawa ke arah disintegrasi nasional. Perbedaan yang mendasar dari Gus Dur ataupun Cak Nur adalah pada sikap atau cara mereka menyampaikan pemikirannya. Jika Cak Nur menuangkan pikirannya pada bidang akademik, Gus Dur lebih memilih untuk langsung terjun. Gus Dur terkenal dengan peran gandanya baik sebagai seorang aktor ataupun sutradara.

B. Pandangan Abdurrahman Wahid Terhadap Pluralisme Agama di Indonesia

Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia. Dengan ribuan pulau yang ada di wilayahnya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dihuni maupun yang tidak, Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dan Negara dengan latar belakang yang paling beraneka ragam. Dengan sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada dibawah naungannya, Indonesia juga adalah sebuah Negara dengan kebudayaan yang sangat beragam.

Dengan keberagaman atau pluralitas yang dimiliki oleh Indonesia, pada kenyataannya terdapat sebuah polemik tersendiri dalam mengartikan Pluralisme di Indonesia. Selama ini terjadi sebuah doktrin bahwa pluralisme adalah sebuah produk barat yang coba di tanamkan di Indonesia. Khususnya

pluralisme agama. Bahkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan tegas mengharamkan Pluralisme dengan dikeluarkannya Fatwa MUI pada tahun 2005 yang mengharamkan Sekulerisme, Pluralisme dan Liberalisme atau lebih dikenal dengan SIPILIS. Alasan dari MUI disini sebenarnya lebih mengharamkan pada anggapan bahwa semua agama adalah sama. Begitu juga beberapa golongan lainnya yang berpendapat bahwa Pluralisme Agama adalah haram hukumnya untuk dianut dan bersifat sesat. Hubungan antar umat beragama cukup dengan saling menghargai saja tidak lebih.

Pluralisme agama telah menjadi salah satu wacana kontemporer yang sering dibicarakan akhir-akhir abad 20, khususnya di Indonesia. Wacana ini sebenarnya ingin menjembatani hubungan antaragama yang seringkali terjadi disharmonis dengan mengatasnamakan agama, diantaranya kekerasan sesama umat beragama, maupun kekerasan antarumat beragama. Indonesia sebagai salah satu negara multi etnis, ras, suku, bahasa, budaya dan agama. Agama-agama dan berbagai aliran tumbuh subur oleh karena itu pemahaman tentang pluralisme agama dalam suatu masyarakat yang demikian majemuk sangat dibutuhkan demi untuk terciptanya stabilitas ketertiban dan kenyamanan umat dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing serta untuk mewujudkan kerukunan antarumat sekaligus menghindari terjadinya konflik sosial yang bernuansa syara'.

Dialog dan komunikasi antarumat beragama merupakan suatu kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh segenap elemen umat beragama,

guna untuk menghilangkan kecurigaan, *suudzhan* dan untuk menjalin hubungan yang harmonis antarsesama umat beragama. Agama Islam sangat terbuka dan selalu membuka diri untuk berdialog dengan sesama umat beragama sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah pada periode Madinah, dialog yang dibangun Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah kemudian melahirkan suatu perjanjian yang sangat terkenal yaitu "Piagam Madinah".

Gus Dur sebagai seorang intelektual dan pemikir Islam sendiri memiliki pandangan yang mungkin dapat dikatakan unik. Sebagai seorang cendekiawan muslim, Gus Dur adalah salah seorang penggagas Pluralisme khususnya Pluralisme Agama untuk ditegakkan di Indonesia. concern dari pemikiran Gus Dur tentang Pluralisme Agama adalah terletak pada sisi Humanitarianisme, sebuah paham yang berintikan pada asas perikemanusiaan¹¹. Pendapat yang mengartikan Pluralisme Agama sebagai penyeragaman bagi semua agama yang ada di Indoneisa ini menurut Gus Dur sendiri adalah bentuk ketakutan dari para pemikir itu sendiri. Pandangan yang menyeragaman semua agama adalah pemikiran sempit yang berasal dari rasa takut akan kemurnian agama itu sendiri. Menurut Gus Dur pemikiran seperti ini adalah buah dari formalisasi Islam, yang mana mencoba untuk mewujudkan "sistem islami" secara fundamental yang akan berakibat pada

¹¹ Greg Barton, Gagasan Islam Liberal Di Indonesia, Op.Cit., Hal 334

pengabaian pluralitas dalam masyarakat¹². Ketakutan-ketakutan akan rusaknya makna agama bagi sebagian orang membuat mereka berpikiran sempit yang berakhir pada pendoktrian akan “sistem islami” dimana segala sesuatu dipandang secara islami, dan yang tidak islami adalah sebuah penyimpangan.

Gus Dur termasuk salah satu orang yang secara tegas menolak bentuk formalisasi, ideologisasi dan syari’atisasi Islam didalam lingkungan masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* dengan jelas Gus dur menjelaskan alasan penolakannya. Menurut pemikiran Gus Dur, Islam di Indonesia tidak tumbuh dan berkembang secara ideologis akan tetapi secara kultural, sehingga jika ideologi Islam di terapkan di Indonesia akan berimbas pada upaya-upaya politis yang akan mengarah pada syari’atisasi Islam. Disini Gus Dur mengambil contoh pada upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan syari’at Islam untuk dijadikan sebagai peraturan atau kebijakan, juga upaya untuk membuat Pancasila sebagai alternatif ideologi Islam¹³.

Menurut Gus Dur, Islam tidak mempunyai wujud doktrin yang pasti tentang bagaimana melaksanakan hal-hal politik-kenegaraan. Memang, pada dasarnya Islam tidak akan pernah lepas dari politik, yakni dalam pengertian

¹² Syafi’I Anwar Dalam Pengantar Buku “Islamku Islam Anda Islam Kita”. The Wahid Institute: Jakarta. 2006. Hal. xv

¹³ Ibid.,

melakukan transformasi sosial-kemasyarakatan. Hanya wujud dan formatnya yang tidak diberikan aturannya yang tegas. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Selama pemerintah bisa mencapai dan mewujudkan keadilan serta kemakmuran, hal itu sudah merupakan kemauan Islam. Gus Dur mempunyai tradisi pemikiran Islam klasik yang kuat tetapi sekaligus diimbangi dengan wawasan modern.

Bagi Gus Dur sendiri Pluralisme Agama patut untuk di terapkan di Indonesia karena melihat Indonesia sendiri sebagai sebuah Negara dengan keberagaman etnik dan agama. Pluralisme Agama bukan berarti menganggap bahwa semua ajaran agama itu sama, semua agama adalah benar, bukan sama sekali. Paham yang menganggap bahwa semua ajaran agama itu sama adalah Singularisme, dan Pluralisme berbeda dengan Singularisme¹⁴. Sikap saling menghargai antar umat beragama adalah sebuah kewajiban didalam masyarakat, akan tetapi sikap untuk saling menyayangi dan mengasihi sesama manusia merupakan ajaran dasar di dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sering mempraktekkan rasa kasihnya terhadap manusia lain meskipun mereka bukan dari golongan yang sama.

Di dalam sebuah tulisan Gus Dur yang berjudul "Fatwa Natal : Ujung dan Pangkal", menjelaskan bagaimana MUI sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dengan masyarakat telah gegabah dalam mengeluarkan

¹⁴ Pendapat ini dilontarkan oleh Alissa Wahid, putri dari alm. Abdurrahman Wahid

sebuah fatwa. Hal ini tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia yang notabenehnya lebih dari 10% penduduknya adalah umat kristiani, dan kontan saja hal ini akan menimbulkan permasalahan didalam masyarakat. Bagi Gus Dur sendiri permasalahannya tidak terletak pada larangan akidah tetapi pada manusia yang mengharuskan segala sesuatu harus berbau islam. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan didalam masyarakat. Gus Dur berpendapat bahwa seharusnya MUI dapat melakukan kajian yang lebih dalam, seperti menyoroti bagaimana merumuskan masalah kemiskinan dari sudut pandang agama, bagaimana penyelesaian masalah tersebut dari sudut pandang agama dan bagaimana implikasinya. Hal ini mungkin akan lebih berguna bagi masyarakat¹⁵.

Konsep pemikiran Gus Dur disini lebih menekankan pada hubungan antara manusia dengan manusia terlepas darimana asal muasal termasuk agama manusia itu sendiri. Karena menurut pendapat Gus Dur persoalan manusia dengan Tuhan berada dalam tataran akidah yangmana pertanggungjawabannya terletak pada diri manusia itu sendiri. Banyak pihak yang sering salah sangka dengan sikap dan perilaku Gus Dur, sebagai seorang kyai dan seorang tokoh Islam Gus Dur lebih sering membela kaum non-muslim. bagi Gus Dur selama ada yang merasa tertindas dan di

¹⁵ Abdurrahman Wahid. Tuhan Tidak Perlu Dibela. LKiS:Yogyakarta. 2011. Hal.13

diskriminasi dalam masyarakat Indonesia, maka ia akan membelanya, terlepas apakah mereka Islam, Kristen, Jawa, Cina dan lainnya.

Sebagai seorang kyai integritas Gus Dur sering dipertanyakan oleh beberapa kalangan karena pembelaan Gus Dur terhadap berbagai kalangan non muslim di Indonesia. Seperti pembelaan Gus Dur terhadap kalangan Ahmadiyah yang sudah jelas memiliki penyimpangan dalam Islam, tapi bagi Gus Dur hak-hak Ahmadiyah untuk melakukan peribadatan juga harus diperhatikan.

“Gus Dur pernah mengatakan di depan pemuka Ahmadiyah bahwa secara ajaran Gus Dur memang menentang Ahmadiyah tetapi hak bagi umat Ahmadiyah dalam beribadah akan diberikan dan akan dibela oleh Gus Dur”¹⁶

Tidak hanya disitu saja, Gus Dur juga menunjukkan pembelaannya terhadap berbagai organisasi keagamaan di luar Islam. Seperti dukungan Gus Dur terhadap Konferensi Waligereja Indonesia pada tahun 80-an, kemudian untuk umat Hindu-Budha di Indonesia. Pembelaan Gus Dur bukan karena masalah keyakinan tetapi lebih kepada menunjukkan bahwa mereka juga memiliki tempat dan andil di Indonesia serta memiliki hak yang sama sebagai seorang warga Negara. Sepak terjang Gus Dur dalam memperjuangkan Pluralisme di Indonesia sudah diterima oleh berbagai kalangan, seperti yang di katakan oleh Franz Magniz-Suseno SJ bahwa:

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Alissa Wahid

“Yang barangkali masih menjadi rahasia adalah rasa percaya dirinya yang luar biasa. Meski yakin pada demokrasi, dan committed 100 persen pada hak-hak asasi manusia, ia sebenarnya merupakan kombinasi antara seorang kiai dan seorang raja Jawa. Kepercayaan diri yang besar itu membuatnya bebas dari sikap defensif dan meyakini pluralisme.”¹⁷

Bagi Abdurrahman Wahid, dengan pemikirannya yang tajam tentang agama dan kebangsaan. Dalam pemikiran kebangsaan ini, ia mengarahkan pemikirannya pada sikap inklusif dalam hidup beragama. Dalam upaya menciptakan keharmonisan antara umat beragama di Indonesia, tidak cukup hanya saling menghormati atau hanya tenggang rasa satu dengan yang lain. Dalam hubungan antar umat beragama itu, haruslah diwujudkan pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan, yaitu perasaan saling memiliki (*Sense of Belonging*) dalam kehidupan secara kemanusiaan “ukhuwah basyariyah”. Umat Islam sebagai penganut mayoritas haruslah mampu menempatkan ajaran agamanya sebagai faktor komplementer, sebagai komponen yang membentuk dan mengisi kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia¹⁸.

Dalam setiap tindakan Gus Dur dikenal tiga rumpun sosial yang mendasari tindakan dan alur berpikir seorang Abdurrahman Wahid, antara lain kepedulian, kesetaraan dan persaudaraan. Tiga hal inilah yang

¹⁷ Franz Magniz-Suseno SJ dalam “Gus Dur” yang diambil dari <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/01/11/KL/mbm.20100111.KL132450.id.html> dan diakses pada 19 September 2011

¹⁸ Diambil dari <http://etd.eprints.ums.ac.id/7047/1/O000030020.pdf>, yang diakses pada tanggal 8 Maret 2012.

mempengaruhi pemikiran Gus Dur. Sikap Gus Dur yang berusaha untuk memperjuangkan pluralisme di Indonesia seringkali dianggap “menodai” agama bagi sebagian pihak. Hal ini pernah diungkapkan sendiri oleh beberapa golongan yang justru berkoar-koar bahwa darah Gus Dur adalah halal. Hal ini justru menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang tidak setuju dengan alur berpikir Gus Dur. Pro kontra terhadap alur berpikir Gus Dur juga masih terjadi sampai sekarang ini. Terkait dengan pihak-pihak yang menolak gagasan Gus Dur, bagi Gus Dur sendiri tidak masalah akan perbedaan dan perdebatan yang ada, selama masih ada dialektika dan rasionalisasi didalamnya.

C. Islam dan Negara Islam menurut pandangan Abdurrahman Wahid.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dengan berbagai macam budaya yang telah mengakar dalam setiap sendi kehidupannya. Terlepas dari itu, Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, walaupun terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Keadaan umat Islam Indonesia tentu saja erat kaitannya dengan bagaimana sejarah masa lampaunya. Sebagai agama yang muncul di Jazirah Arab, Islam sampai kepulauan Nusantara dapat dilihat sebagai fungsi ekonomi dan kebudayaan orang-orang Arab yang pada masanya sering datang ke kawasan ini sebelum Nabi Muhammad Saw. Masuknya Islam ke Indonesia bukanlah suatu peristiwa penaklukan militer atas suatu kaum, akan tetapi masuknya Islam ke Indonesia dengan cara damai

dan membawa misi ekonomi yaitu perdagangan.¹⁹ Meskipun datang melalui misi yang damai, tidak berarti Islam di Indonesia terlepas dari gejolak masalah. Suasana itu ditunjukkan ketika di Indonesia didatangi bangsa barat untuk melakukan kolonialisasi terhadap Indonesia. Islam di Indonesia mempunyai kesejarahan yang heroik tersendiri dalam pertumbuhannya.

Mungkin harus dikatakan bahwa Islam di Indonesia, dalam kelembutan metode perembesan damainya, masih tetap menunjukkan ciri sosial budayanya yang dapat disebut radikal, yakni dalam hal sifat egaliter dan semangat keilmuan yang sekaligus merupakan daya tarik agama ini.²⁰

Gagasan tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami *fluctuative discourse* dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu diperdebatkan pada momen-momen tertentu. Hampir bisa dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Sejak pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh Politikus dan Agamawan, khususnya Islam.

¹⁹ Nurcholish Madjid. Islam Kemodernan dan Keindonesiaan...*Opcit.* hal 56

²⁰ *Ibid.*

Padatahun 1950-1955 melahirkan sistem multipartai, ini merupakan kesempatan besarbagi Partai Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai asas Negara, akan tetapiapa yang dicita-citakannya masih belum bisa dicapai sampai sekarang. Hal yangsama terjadi pada 1999 tahun lalu yang menggunakan sistem multipartai danlagi-lagi Islam belum cukup kuat untuk meletakkan ideologi Islam sebagai dasarnegara. Berhubung partai politik merupakan salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita gagasan, tidak menutup kemungkinan bahwa pemilu 2004 yang akan datang juga muncul polemik sistem negara apalagi Islam formalis masih berada di ujung kekakalahan.

Sebelumnya pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi pancasila yang di instruksikan oleh Soeharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni mengenai perdebatan ideologi. Sebenarnya sumber perdebatan itu adalah relasi Islam dan negara, khususnya mengenai sistem negara apa yang akan dipakai untuk membangun Indonesia,apakah berasaskan Islam atau sekuler .

Bagi Gus Dur sendiri relasi antara politik, budaya dan agama di ideologikan fungsinya bisa terdistorsi karena yang muncul bukanlah strukturyang lebih baik melainkan konflik horizontal. Hal yang senada diungkapkan oleh Cak Nur bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi,sebab pendapat Islam sebagai ideologi hanya akan menyamakan agama itu setaraf dengan ideologi-ideologi yang ada di dunia.

Wacana dari beberapa kalangan yang menginginkan didirikannya sebuah Negara Islam (NI) di Indonesia baru-baru ini mulai merebak lagi di Indonesia. Gus Dur sebagai seorang ulama dan seorang cendekiawan memiliki pandangan dan pemikiran tersendiri terhadap Negara Islam di Indonesia. Menurut Gus Dur, rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki dan digabungkan dengan rasa kekhawatiran sangat besar melihat tantangan modernisasi terhadap lembaga atau institusi ke-Islam-an, membuat mereka melihat bahaya di mana-mana terhadap Islam. Proses pemahaman keadaan seperti itu, yang terlalu ditekankan pada aspek kelembagaan/institusional Islam belaka, dapat dinamakan sebagai proses pendangkalan agama kalangan kaum muslimin. Pihak-pihak lain yang non-Muslim juga mengalami pendangkalan seperti itu, dan juga memberikan responsi yang salah terhadap tantangan keadaan. Kalau kita melihat pada budaya atau kultur kaum muslimin dimana-mana, sebenarnya kekhawatiran demikian besar seperti itu tidak seharusnya ada di kalangan mereka. Cara hidup, membaca Al-Qur'an dan Hadist, main rebana, tahlil, berbagai bentuk "seni Islam" dan lain-lainnya, justru mampu menumbuhkan rasa percaya diri yang besar, dalam diri kaum Muslimin²¹.

²¹Abdurrahman wahid, dalam NU dan Negara Islam, yang dikutip dari http://www.gusdur.net/Pemikiran/Detail?id=103/hl=id/NU_Dan_Negara_Islam_2, dan diakses pada 3 Oktober 2011

Munculnya golongan-golongan yang menginginkan dibentuknya sebuah NI memang memiliki dalil Al-Quran yang jelas, seperti pada dalil "Barang siapa tidak (ber) pendapat hukum dengan apa yang di turunkan Allah, mereka adalah orang yang kafir " (*Wa Man lam Yahkum Bima Anzala Allah Fa-hula Ika Hum al-Kafirun*), yang mana dapat dipahami bahwa dalam menjalankan hukum Allah haruslah dibentuk sebuah NI. Namun Gus Dur sendiri secara terbuka memberikan tanggapannya bahwa, karena ada masyarakat yang menerapkan hal itu, dan, atau mendidik kita agar melaksanakan hukum Allah, maka negara dapat saja ditinggalkan. Untuk memelihara prularitas bangsa, tidak ada kewajiban mendirikan NI atau menentang mereka yang menentang adanya gagasan mendirikan NI. Netralitas seperti inilah yang sebenarnya jadi pandangan Islam dalam soal wajib adanya gagasan mendirikan NI. Netralitas ini sangat penting untuk di junjung tinggi, karena hanya dengan demikian sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dapat didirikan. Dengan gagasan mendirikan NI, maka pihak minoritas, baik minoritas agama maupun minoritas lain-lainnya, tidak mau berada dalam sebuah negara dan menjadi bagian dari negara tersebut.

Dengan demikian, yang dinamakan Republik Indonesia tidak dapat diwujudkan, karena ketidaksediaan tersebut. Akhirnya, Indonesia akan tidak terwujud sebagai kesatuan, karena ada negara Aceh, negara bagian Timur dan Selatan dari Sumatra Utara, negara Sumatra Barat, Jambi. Bengkulu., Sumatra Selatan, Lampung, Seluruh pulau Jawa, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan sebagian Maluku yang lain-lainnya, berada di luar susunan kenegaraan, karena berdasarkan agama seperti itu.

Menurut cerita dari Romo Frans Magnis Suseno, Gus Dur orang pertama yang menawarkan solusi ketegangan antara agama dan Pancasila yaitu dengan cara menerima Pancasila sebagai asas tunggal, yg ditolak oleh kalangan agama baik katolik, protesan maupun kelompok-kelompok islam seperti Muhamadiyah dan lainnya. Dimunas Situbondo tahun 1983 yang melahirkan Kembali ke Khitah 1926, ketika NU sudah mendeklarasikan akan menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi, dengan menggeser islam sebagai akidah, semula dalam AD/ART NU hanya ada azas tanpa akidah. Namun setelah menerima Pancasila sebagai Azas Tunggal, AD/ART NU berubah. Akhirnya dibuatlah dalam AD/ART tersebut, Akidah NU adalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, Azasnya adalah Pancasila, ini bisa ditafsirkan macam-macam oleh banyak orang, salah satunya seperti anggapan adanya pemisahan antara agama dan Negara, secara akademik tafsiran ini belum dieksplorasi oleh ilmuwan termasuk ilmuwan NU. Sebagai perbandingan dinegara yang umat islamnya besar pun terjadi pertentangan, yang mana berakhir pada pertumpahan darah²².

²²Diambil dari tulisan Gus Dur dan Pancasila, yang diutip dari <http://www.facebook.com/notes/kongkow-bareng-gus-dur/gus-dur-dan-pancasila-bagian-1/10150872148695165>. Di akses pada tanggal 8 Maret 2012

Gus Dur menegaskan di negara yang berazaskan Pancasila, orang non muslim, aliran kepercayaan harus dilindungi oleh negara. Umat Islam selalu mengalami masalah tentang keislaman dan keindonesiaan, ada *gap* antara keduanya, Gus Dur mendorong kedua hal itu menjadi tunggal, bahwa keislaman dan keindonesiaan itu adalah satu dalam diri kita, jadi dalam diri orang Islam Indonesia ada toleransi terhadap agama lain, etnis lain, terhadap berbagai perbedaan yang ada. NU selalu berinteraksi dengan keindonesiaan, NU sudah melalui tahap tertentu dalam merumuskan hubungan dengan kenegaraan. Bisa kita lihat Muktamar NU 1936, NU sudah mampu menjawab hubungan NU dengan negara. Negara Kolonial tidak serta merta dikatakan negara kafir, NU harus mempertahankan negara, bukan karena membela negara Kolonial, tapi karena otoritas yg memimpin itu tidak melakukan pelanggaran terhadap ibadah/syariatnya orang islam²³.

Gus Dur adalah tokoh Muslim terdepan yang menentang negara Islam simbolik di Indonesia. Gus Dur memandang bahwa Pancasila adalah kompromi politik yang memungkinkan semua orang Indonesia hidup bersama-sama dalam sebuah negara kesatuan nasional Indonesia. Menurutnya, tanpa Pancasila, Indonesia akan berhenti sebagai negara. Douglas E. Ramage mencatat bahwa penafsiran Gus Dur dan rujukannya yang sering pada

²³ Ibid,

Pancasila erat kaitannya dengan peranannya sebagai ulama-pesantren, yang memiliki komitmen kuat pada pluralisme dan nilai-nilai inti demokrasi.

Telah lama ia berpendapat bahwa umat Islam harus berpegang pada Pancasila. Ia memahami Pancasila sebagai syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehat dalam konteks nasional. Di matanya, Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada konsensus dan kompromi dan kompromi itu inheren dalam Pancasila. Dengan penuh keyakinan, Gus Dur berpendapat bahwa pemerintahan yang berideologi Pancasila, termasuk negara damai (*dar al-shulh*) yang harus dipertahankan. Menurutnya, hal ini adalah cara yang paling realistis secara politik jika dilihat dari pluralitas agama di Indonesia.

Lebih jauh, bagi Gus Dur, hal ini sepenuhnya konsisten dengan doktrin keagamaan Islam yang tidak memiliki perintah mutlak untuk mendirikan negara Islam. Islam tandas Gus Dur tidak mengenal sistem pemerintahan yang definitif dan baku. Dalam persoalan yang paling pokok, misalnya suksesi kekuasaan, ternyata Islam tidak memiliki sistem yang baku; terkadang memakai *istikhlâf*, *bai'at* dan *ahl al-hall wa al-'aqdi* (sistem formatif). Padahal, dalam pandangan Gus Dur, soal suksesi adalah soal yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. "Kalau memang Islam punya sistem yang baku, tentu tidak terjadi demikian," komentar Gus Dur.

"Ada konsepsi menarik dari Gus Mus yang mengungkapkan bahwa kelompok yang ada di Indonesia saat ini yang lebih besar keislamannya

daripada ke Indonesiaannya adalah kelompok-kelompok yang tidak ada pada saat perumusan kemerdekaan. Jika dalam istilahnya Gus Dur adalah Islam Anyar dan Islam Nusantara. Islam Anyar adalah kelompok yang pada saat negosiasi kemerdekaan tidak ada, jadi ketika sekarang kelompok fundamentalis atau Islam anyar tadi mengemukakan Negara Islam dan sebagainya, ini karena mereka tidak memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Karena mereka muncul ketika Indonesia setelah merdeka. Ini adalah geo-politik yang jika meminam istilah Kyai Khudori, Islam Anyar ini adalah Islam kos-kosan”²⁴.

Berangkat dari sinilah dapat ditarik pemikiran Gus Dur yang berdasarkan pada kemerdekaan Indonesia, dimana pada saat perumusan kemerdekaan Islam berinteraksi dengan elemen lainnya yang berasal dari berbagai agama. Jadi Negara Indonesia bukan Negara Islam”.

Tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk baku yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui ayat al-Qur'an maupun al-Hadits, membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan dan tercegah lagi. Dengan demikian, maka kesepakatan akan bentuk negara tidak bisa lagi dilandaskan pada dalil *naqli*, melainkan pada kebutuhan masyarakat pada suatu waktu. Inilah yang menyebabkan mengapa hanya sedikit sekali Islam berbicara tentang bentuk negara. Menurutnya, Islam memang sengaja tidak mengatur konsep kenegaraan. Yang ada dalam Islam hanyalah komunitas agama

²⁴ Hasil Wawancara dengan Alissa Wahid

(*kuntum khaira ummatin ukhrijat li al-nâs*), bukan *khaira dawlatin*, apalagi *khaira mamlakatin*, kilahnya²⁵.

Filsafat politik yang mendasari pemikiran Gus Dur adalah bagaimana mengkombinasikan kesalehan Islam dengan apa yang disebutnya komitmen kemanusiaan. Baginya, nilai itu bisa digunakan sebagai dasar bagi penyelesaian tuntas persoalan utama kiprah politik umat, yakni posisi komunitas Islam pada sebuah masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Humanitarianisme Islam pada intinya menghargai sikap toleran dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap kerukunan sosial. Dari kedua elemen asasi inilah sebuah modus keberadaan politik komunitas Islam negeri ini harus diupayakan.

Cita negara yang secara konsisten diperjuangkan Gus Dur adalah tatanan politik nasional yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan, di mana semua warga negara memiliki derajat yang sama tanpa memandang asal-usul agama, ras, etnis, bahasa dan jenis kelamin. Konsekuensinya, politik umat Islam di Indonesia pun terikat dengan komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusifisme, sektarianisme, dan primordialisme politik harus dijauhi. Termasuk di sini adalah pemberlakuan ajaran agama melalui negara dan

²⁵Dikutip dari http://www.gusdur.net/Opini/Detail/?id=238/hl=id/Inspirasi_Dari_Pemikiran_Gus_Dur, yang diakses pada tanggal 8 Maret 2012

hukum formal, demikian pula ide proporsionalitas dalam perwakilan di lembaga-lembaga negara. Sebab, tuntutan-tuntutan semacam ini jelas berwajah sektarian dan berlawanan dengan asas kesetaraan bagi warga negara.

Dalam tulisan Gus Dur sebagai pengantar di buku *Ilusi Negara Islam*, dengan jelas Gus Dur mengatakan bahwa pada umumnya aspirasi kelompok-kelompok garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam Transnasional di Timur Tengah. Kelompok garis keras di Indonesia memiliki agenda yang berbeda dengan ormas Islam lainnya, dalam beberapa tahun terakhir kelompok garis keras telah mampu mengubah wajah Islam Indonesia yang ramah menjadi brutal di mata masyarakat internasional.²⁶ Menurut Gus Dur gerakan-gerakan seperti Wahabiyah, Ikhwanul Muslimin, PKS, DI dan HTI yang secara langsung menawarkan Islam yang berbeda di Indonesia karena pada dasarnya mereka hanya fokus pada “Islam” itu sendiri, dalam bahasa Gus Dur disebut inklusif. Karena gerakan-gerakan tersebut tidak datang dari dalam diri Indonesia tapi karena dipengaruhi oleh Islam di luar Indonesia yang memiliki perbedaan cukup mendasar. Disadari oleh Gus Dur bahwa gerakan seperti HTI ini memang tumbuh subur di Negara-negara berasaskan Demokrasi seperti Indonesia, karena hanya di Negara

²⁶Abdurrahman Wahid dalam Pengantar *Ilusi Negara Islam*. 2009. PT. Desantara Utama Media:Jakarta. Hal.20

demokrasilah hak-hak setiap manusia di dengar dan di berikan ruang, tidak seperti di Timur Tengah.

Yang penting bagi Gus Dur adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Dengan memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Islam, Gus Dur bisa mengatakan bahwa dia sedang memperjuangkan Islam. Di mata Gus Dur, Islam hanya dilihat sebagai sumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral, bukan sebagai simbol sosial dan politik belaka. Dengan kata lain, Islam tidak dibaca dari sudut verbatim doktrinalnya, tetapi coba ditangkap spirit dan rohnya. Islam dalam maknanya yang legal formal tidak bisa dijadikan sebagai ideologi alternatif bagi cetak biru negara bangsa Indonesia. Islam merupakan faktor pelengkap di antara spektrum yang lebih luas dari faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa.

Walhasil, visi Gus Dur tentang Indonesia masa depan adalah negara-bangsa Indonesia yang demokratis, pluralis, toleran, dan humanis, yakni negara yang menjamin kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara dari berbagai latar belakang agama, etnis, gender, aliran, bahasa, dan status sosial. Seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan mereka.

Tabel Kelemahan dan Kelebihan pemikiran Gus Dur

Kelebihan pemikiran Gus Dur	Kekurangan atau kritik terhadap pemikiran Gus Dur
<p>Pembelaan Gus Dur akan kelompok minoritas di Indonesia membuat kaum minoritas mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga Negara.</p>	<p>Sebagian kaum muslim di Indonesia tidak mengerti dengan pembelaan Gus Dur akan kaum minoritas yang bagi mereka tidak perlu dibela. Kritikan ini menimbulkan sikap anti Gus Dur yang turut serta dalam upaya penurunan Gus Dur sebagai Presiden RI</p>
<p>Gus Dur menawarkan konsep Pluralisme Agama dengan menjalin hubungan baik dengan pemeluk agama baik sebagai individu ataupun umat beragama. Gus Dur melihat hal ini perlu untuk diterapkan di Indonesia yang mana berbasis plural, dan inilah yang menyatukan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Gus Dur hanya ingin cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam konstitusi tidak dinodai dengan konflik yang berbau SARA.</p>	<p>Konsep Pluralisme Gus Dur menuai banyak kritik dan perdebatan dikalangan umat Islam, terutama dari golongan fundamentalis yang menganggap bahwa pemikiran Gus Dur sudah jauh melenceng dari ajaran agama Islam sebenarnya. Hal ini membuat Gus Dur dimusuhi oleh banyak kalangan dan mendapatkan cap kafir oleh beberapa golongan. Pemikiran Gus Dur ini juga ditentang oleh MUI dengan dikeluarkannya fatwa MUI yang mengharamkan Pluralisme, Liberalisme dan sekularisme (SIPILIS).</p>
<p>Gus Dur memiliki pemikiran bahwa Islam tidak dapat</p>	<p>Pemikiran Sekuler dari Gus Dur ini tentu saja menuai</p>

<p>dimasukkan kedalam ideologi bangsa, harus ada pemisahan, karena jika Islam digunakan sebagai ideology Negara maka Islam akan sama dengan ideology-ideologi lain di dunia ini. Pemikiran sekuler dari Gus Dur ini berusaha untuk menghindarkan konflik didalam tubuh Indonesia, dan juga bagi Gus Dur Islam tidak perlu dibakukan dalam bentuk Negara.</p>	<p>banyak kritikan, karena bagaimanapun juga Islam adalah mayoritas agama yang dianut di Indonesia, dan tentu saja Islam harus mengisi kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Bagi sebagian besar warga muslim sekulerisme masih asing dan lagi merupakan produk barat, ketakutan yang ada adalah bahwa hal ini akan merusak ajaran Islam .</p>
<p>Sikap <i>open minded</i> dari Gus Dur dan pemikiran-pemikirannya, merupakan pandangan jauh kedepan dan akan membawa kehidupan yang lebih baik bagi Indonesia kedepannya. Baik dalam hal ekonomi, hubungan internasional Indonesia, dan juga agama. Semua yang dulu diungkapkan dan dilakukan oleh Gus Dur pada kenyataannya terbukti dimasa-masa sekarang ini, misalkan saja dalam menghadapi Cina.</p>	<p>Sebagian besar orang memang mengkritik pikiran-pikiran Gus Dur terutama saat masih menjabat sebagai Presiden RI, karena banyak pikiran Gus Dur yang dirasa tidak masuk akal dan keluar dari jalur untuk diterapkan pada masa itu.</p>

Tabel 1.2²⁷

²⁷ Diambil dari ringkasan pemikiran Gus Dur